

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asari, N. M. A., & Suardana, K. A. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Belanja Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, 25(2), 877-904.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Cipta, W. 2014. Analisis Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Berdasarkan Value for Money Audit Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2007-2011. *E-Journal Bismal*, 2(1), 35–42.
- Constantia Ranggidae, Herny. 2020. *Kinerja dan Pengukuran Kinerja. Dalam Mesri Welhelmina Nisriani manafe (Ed). Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Teori dan Aplikasi* (hlm.19-31). Bandung: Media Sains Indonesia.
- Dwinanda, Y. 2018. *Analisis Value for Money dalam pengukuran kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta*. Skripsi thesis, Sanata Dharma University.
- Harindra, I., & Sapari, S. 2019. Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Value For Money. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(2).
- <http://kolakakab.go.id/> (Diakses pada tanggal 7 April 2023)
- Indrayani, I., & Khairunnisa, K. 2018. Analisis Pengukuran Kinerja dengan Menggunakan Konsep Value For Money pada Pemerintah Kota Lhokseumawe:(Studi Kasus Pada DPKAD Kota Lhokseumawe Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi dan keuangan*, 6(1), 1-10.
- Kartini, Kartono.1998. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: ALUMNI
- Khairunnisa, A. 2021. Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dengan Menggunakan Prinsip Value for Money (Studi Kasus pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara). Skripsi. (Doctoral dissertation, UMSU).
- Maharani, Y., & Sari, R. 2021. *Konsep Value for Money untuk Pengukuran Kinerja pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang*. *Jurnal IAKP*, 2(1), 97-103.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Majid, J. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*.Gowa Sulawesi Selatan: Pustaka Almaid
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- _____ 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- _____ 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI

- Moeheriono. 2019. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja. Grafindo Persada
- Muhammad Mahsum. 2009. “*Pengukuran Kinerja Sektor Publik* “. Yogyakarta : BFEE
- Nasution, A. P. 2018. Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(2), 15-25.
- Nurafifah, I. P., Haliah, H., & Nirwana, N. 2022. Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money (Studi Kasus Pada Kabupaten Nabire Tahun 2019-2021). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 66-72.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2006. (Online), (<https://peraturan.bpk.go.id/>, diakses 4 November 2022)
- Keppmendagri No 690.900.327. Tahun 1996, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006*. 2007 (Online), (<https://peraturan.bpk.go.id/>, diakses 2 November 2022)
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2019. (Online), <https://peraturan.bpk.go.id/> diakses 2 November 2022
- Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2022 tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Kolaka Tahun 2019-2024*.
- Polii, I. R., Saerang, D. P., & Tangkuman, S. J. 2020. Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 8(4).
- Putri, N. Z. A. 2020. *Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*. Disertasi. (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. 2018. Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- _____ 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press

Ulum, I. (2009). *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah. 2003. (Online), (<https://www.bpk.go.id/>, diakses 1 November 2022)

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 2004. (Online), (<https://peraturan.bpk.go.id/> diakses 3 November 2022)

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. (Online), (<https://www.dpr.go.id/>, diakses 3 November 2022)

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2004. (Online), (<https://www.dpr.go.id/>, diakses 3 November 2022)

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 2004. (Online), (<https://peraturan.bpk.go.id/>, diakses 1 November 2022)

Wahiji, T. R. M., Karamoy, H., & Kapojos, P. M. 2022. *Analisis Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo*. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum), 6(1), 335-344.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Biodata

BIODATA**Identitas Diri**

Nama : Wayan Anggita Suridiyanti
 Tempat, Tanggal Lahir : Mangkutana, 17 Juli 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat Rumah : Pondok Sudirman Kalosi, Jl. Sejati
 Telepon Rumah/HP : 082338336184
 Alamat E-mail : wayananggita01@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

Tahun 2006-2007 : TK Handayani
 Tahun 2007-2013 : SD Negeri 1 Puudongi
 Tahun 2013-2016 : SMP Negeri 1 Polinggona
 Tahun 2016-2019 : SMA Negeri 1 Watubangga

Pendidikan Non Formal

Tahun 2019 : Pelatihan *Basic Learning Skills, Character & Creativity* (BALANCE) Universitas Hasanuddin
 Tahun 2020 : Bina Kader Mahasiswa Akuntansi (BKMA) Ikatan Mahasiswa Akuntansi Universitas Hasanuddin

Riwayat Prestasi

Prestasi Akademik : -

Pengalaman

Kerja : -

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar 02 Mei 2023

Wayan Anggita Suridiyanti

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Meneliti



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Pemuda No. 118 Telp. (0405) 2321366 Kolaka 93517

SURAT KETERANGAN

Nomor : 900/51/2023

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hj. ANDI TENRI GAU, SE.,MM
 NIP : 19650725 199307 2 001
 Golongan : Pembina Utama Muda Gol. IV/c
 Jabatan : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wayan Anggita Suridiyanti
 NIM : A031191132
 Asal pendaftaran : Desa Puudongi, Kec. Polinggona, Kab.Kolaka
 Program Studi : Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Asal Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kab. Kolaka terhitung tanggal, 7 Februari s/d 23 Februari untuk mengumpulkan data terkait penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dengan Menggunakan Prinsip Value For Money Periode Tahun 2019-2021**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kolaka, 27 Februari 2023

KEPALA BKAD KABUPATEN KOLAKA

 HJ. ANDI TENRI GAU, SE.,MM
 Pembina Utama Muda Gol.IV/c
 NIP. 19650725 199307 2 001

Lampiran 3 Laporan Realisasi Anggaran



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2019
 (Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Lebih/
				(Kurang)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
3	Pendapatan Pajak Daerah	29.890.487,700.00	37.442.463.464.00	7.551.975.764.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	14.735.979.910.00	6.181.101.861.00	(8.554.878.049.00)
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.271.174.747.00	12.019.453.382.00	748.278.635.00
6	Lain-lain PAD yang sah	60.795.088.667.00	56.689.961.094.95	(4.105.127.572.05)
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	116.712.731.024.00	112.352.979.801.95	(4.359.751.222.05)
8	PENDAPATAN TRANSFER			
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERimbangan			
10	Dana Bagi Hasil Pajak	22.730.754.000.00	17.976.116.695.00	(4.754.617.305.00)
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	116.864.476.000.00	133.004.767.853.00	16.140.291.853.00
12	Dana Alokasi Umum	613.290.258.000.00	611.181.698.000.00	(2.108.560.000.00)
13	Dana Alokasi Khusus	234.193.296.000.00	220.012.205.794.00	(14.181.090.206.00)
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	987.178.364.000.00	982.174.788.342.00	(5.003.575.658.00)
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA			
16	Dana Penyesuaian	117.356.959.000.00	117.356.959.000.00	0.00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16)	117.356.959.000.00	117.356.959.000.00	0.00
18	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	73.499.400.000.00	38.260.381.796.00	(35.239.018.204.00)
20	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Daerah	-	-	0.00
1.2.3.3	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	0.00
21	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (19 s/d 20)	73.499.400.000.00	38.260.381.796.00	(35.239.018.204.00)
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LAINNYA			
23	Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-	0.00
24	Bantuan Keuangan Lainnya dari Provinsi	-	-	0.00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya (23 s/d 24)	-	-	0.00
26	Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 17 + 21 + 25)	1.178.675.223.000.00	1.177.792.129.138.00	(883.093.861.00)
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
28	Pendapatan Hibah	38.925.208.000.00	35.710.290.135.00	(3.214.917.865.00)
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	-	-	0.00
29	Pendapatan Lainnya	-	-	0.00
30	Jumlah Pendapatan Lain - lain yang Sah (28 s/d 29)	38.925.208.000.00	35.710.290.135.00	(3.214.917.865.00)
31	TOTAL PENDAPATAN (7 + 26 + 30)	1.313.671.142.027.00	1.285.795.999.074.95	(27.875.142.952.05)
32	BELANJA			
33	BELANJA OPERASI			
34	Belanja Pegawai	457.336.995.309.15	417.321.777.713.00	(39.985.217.596.15)
35	Belanja Barang dan Jasa	356.215.710.744.27	326.345.467.912.00	(29.870.242.832.27)
36	Belanja Bunga	-	-	0.00
37	Belanja Hibah	12.365.000.000.00	11.307.710.000.00	(1.057.290.000.00)
38	Bantuan Sosial	4.659.000.000.00	4.559.000.000.00	(100.000.000.00)
39	Bantuan Keuangan	-	-	0.00
39	JUMLAH BELANJA OPERASI (34 s/d 38)	830.566.706.053.42	759.463.955.625.00	(71.102.750.428.42)
40	BELANJA MODAL			
41	Belanja Tanah	13.273.917.800.00	12.856.496.700.00	(417.421.100.00)
42	Belanja Peralatan dan Mesin	50.177.867.344.00	46.240.197.684.00	(3.937.669.660.00)
43	Belanja Gedung dan Bangunan	181.142.365.715.20	173.722.318.121.00	(7.420.047.594.20)
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	122.110.940.662.40	116.397.655.564.00	(5.713.285.098.40)
45	Belanja Aset Tetap Lainnya	6.618.176.172.00	4.713.653.800.00	(1.904.522.372.00)
46	Belanja Aset Lainnya	-	-	0.00
47	JUMLAH BELANJA MODAL (41 s/d 46)	373.343.267.694.00	353.910.324.869.00	(19.432.942.825.00)
48	BELANJA TAK TERDUGA			
49	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000.00	816.800.000.00	(683.200.000.00)
50	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (49)	1.500.000.000.00	816.800.000.00	(683.200.000.00)
51	TRANSFER			
52	TRANSFER/RAGI HASIL PENDAPATAN			
53	Transfer Ragi hasil Pendapatan Lainnya	2.864.700.00	-	2.864.700.00
54	JUMLAH TRANSFER/RAGI HASIL PENDAPATAN	2.864.700.00	-	2.864.700.00
55	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN			
56	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	159.307.035.800.00	157.114.881.456.00	(2.192.154.344.00)
57	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	421.207.600.00	421.207.600.00	0.00
58	Transfer Bantuan Keuangan Khusus	4.624.200.000.00	4.613.700.000.00	(1.050.000.000.00)
59	JUMLAH TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN (56 s/d 58)	165.138.835.800.00	162.936.189.056.00	(2.198.646.744.00)
60	TOTAL BELANJA & TRANSFER (39 + 47 + 50 + 54 + 59)	1,369,795,341,847.42	1,276,340,969,356.00	(93,454,381,927.42)
61	SURPLUS/DEFISIT (31 - 60)	(56,122,219,820.42)	9,414,829,724.95	61,747,049,545.37

62	PEMBIAYAAN				0.00
63	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				0.00
64	Penggunaan SILPA				79,437.00
65	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	42,122,219,820.42		42,122,299,257.42	0.00
66	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (64 +/d 65)	42,122,219,820.42		42,122,299,257.42	79,437.00
67	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
68	Pembentukan Dana Cadangan	-		-	
69	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6,000,000,000.00		6,000,000,000.00	
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-		-	
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-		-	
	Pembayaran Dana Bergulir	-		-	
3.2.4	Penyaluran Dana Bergulir	-		-	
71	Uang Perhitungan Pihak Ketiga (PTK)/Uang Belanja	6,000,000,000.00		6,000,000,000.00	
72	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (68 +/d 70)	6,000,000,000.00		6,000,000,000.00	
72	PEMBIAYAAN BERSIH (66 - 71)	36,122,219,820.42		36,122,299,257.42	
73	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN/SILPA (61 - 72)	0.00		45,536,728,782.37	



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020
(Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	Anggaran 2020	Realisasi 2020
1	1	3	4
1	PENDAPATAN		
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH		
3	Pendapatan Pajak Daerah	37,303,032,500.00	35,574,740,549.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	19,764,885,658.00	7,530,822,704.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12,592,488,000.00	11,479,604,880.00
6	Lain-lain PAD yang sah	66,753,785,644.00	62,831,031,197.69
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	136,414,191,802.00	117,416,199,330.69
8	PENDAPATAN TRANSFER		
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN		
10	Dana Bagi Hasil Pajak	19,046,303,000.00	21,963,278,017.00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	61,399,814,000.00	100,000,490,298.00
12	Dana Alokasi Umum	555,034,971,000.00	550,288,497,000.00
13	Dana Alokasi Khusus	208,326,504,372.00	205,204,739,978.00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	843,807,592,372.00	877,457,005,293.00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		
16	Dana Penyesuaian	141,664,258,000.00	140,982,910,600.00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16)	141,664,258,000.00	140,982,910,600.00
18	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	73,499,400,003.00	36,186,598,265.00
20	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Daerah	0.00	0.00
21	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (19 s/d 20)	73,499,400,003.00	36,186,598,265.00
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LAINNYA		
23	Bantuan Keuangan dari Provinsi	0.00	0.00
24	Bantuan Keuangan Lainnya dari Provinsi	0.00	0.00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya (23 s/d 24)	0.00	0.00
26	Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 17 + 21 + 25)	1,054,971,250,375.00	1,054,626,514,158.00
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
28	Pendapatan Hibah	125,304,142,808.00	45,612,692,447.00
29	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00
30	Pendapatan Lainnya	0.00	0.00
31	Jumlah Pendapatan Lain - lain yang Sah (28 s/d 29)	125,304,142,808.00	45,612,692,447.00
32	TOTAL PENDAPATAN (7 + 26 + 30)	1,320,689,584,985.00	1,217,655,405,935.69
33	BELANJA		
34	BELANJA OPERASI		
35	Belanja Pegawai	462,359,879,337.23	419,363,507,149.00
36	Belanja Barang dan Jasa	379,995,054,619.14	356,898,841,118.00
37	Belanja Hibah	14,619,370,025.00	12,644,721,250.00
38	Bantuan Sosial	2,194,000,000.00	1,594,000,000.00
39	Bantuan Keuangan	-	-
40	JUMLAH BELANJA OPERASI (34 s/d 38)	859,168,303,981.37	790,501,069,517.00
41	BELANJA MODAL		
42	Belanja Tanah	9,099,269,270.00	6,622,166,974.00
43	Belanja Peralatan dan Mesin	53,291,160,055.00	52,830,006,929.00
44	Belanja Gedung dan Bangunan	151,637,444,223.00	146,059,557,198.00
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	93,316,408,968.00	85,859,453,349.00
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	3,890,074,850.00	3,743,490,730.00
47	Belanja Aset Lainnya	0.00	0.00
48	JUMLAH BELANJA MODAL (42 s/d 47)	311,224,357,366.00	295,114,675,180.00
49	BELANJA TAK TERDUGA		
50	Belanja Tidak Terduga	40,000,000,000.00	22,993,974,165.00
51	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (50)	40,000,000,000.00	22,993,974,165.00
52	TRANSFER		
53	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN		
54	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5,729,400.00	0.00
55	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN	5,729,400.00	0.00
56	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN		
57	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	146,275,957,220.00	131,827,877,270.00
58	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0.00	0.00
59	Transfer Bantuan Keuangan Khusus	5,983,400,000.00	4,910,800,000.00
60	JUMLAH TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN (57 s/d 59)	152,259,357,220.00	136,738,677,270.00
61	TOTAL BELANJA & TRANSFER (40 + 48 + 51 + 55 + 60)	1,362,657,747,967.37	1,245,348,396,132.00
62	SURPLUS/DEFISIT (31 - 61)	(41,968,162,982.37)	(27,692,990,196.31)
63	PEMBIAYAAN		
64	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		

65	Penggunaan SILPA	45,536,728,782.37	44,751,216,305.37
66	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	0.00	0.00
67	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (65 a/d 66)	45,536,728,782.37	44,751,216,305.37
68	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
69	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00
70	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3,568,565,800.00	3,568,565,800.00
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0.00	0.00
72	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (69 a/d 71)	3,568,565,800.00	3,568,565,800.00
73	PEMBIAYAAN BERSIH (66 - 71)	41,968,162,982.37	41,182,650,505.37
74	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN/SILPA (62 - 73)		13,489,660,309.06



PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2021
 (Disajikan dalam Rupiah)

No	URAIAN	Catatan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	1	2	3	4
1	PENDAPATAN	5.1.1.		
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.a.		
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1.	52,092,487,337.00	38,509,672,372.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2.	9,701,768,554.00	7,142,476,395.00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3.	17,592,488,000.00	17,192,467,184.00
6	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.a.4.	64,695,911,550.00	59,852,240,131.32
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)		144,082,655,441.00	122,696,856,082.32
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.b.		
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.b.1.		
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1.a.	15,213,648,000.00	41,986,404,333.00
11	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.b.1.b.	114,963,394,322.00	157,618,317,011.00
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.b.1.c.	542,631,257,000.00	542,631,257,000.00
13	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.b.1.d.	252,376,891,000.00	241,822,611,036.00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)		925,185,190,322.00	984,058,589,380.00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.b.2.		
16	Dana Penyesuaian	5.1.1.b.2.	121,355,989,000.00	120,162,912,600.00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16)		121,355,989,000.00	120,162,912,600.00
18	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.b.3.		
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.1.b.3.a.	90,686,491,055.00	42,455,496,413.00
20	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi Daerah	5.1.1.b.3.b.	0.00	0.00
21	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (19 s/d 20)		90,686,491,055.00	42,455,496,413.00
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI - LAINNYA	5.1.1.b.4.		
23	Bantuan Keuangan dari Provinsi	5.1.1.b.4.	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
24	Bantuan Keuangan Lainnya dari Provinsi		0.00	0.00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya (23 s/d 24)		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
26	Jumlah Pendapatan Transfer (14 + 17 + 21 + 25)		1,139,227,670,377.00	1,148,676,998,393.00
27	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.c.		
28	Pendapatan Hibah	5.1.1.c.1.	14,842,525,000.00	5,847,593,668.00
29	Pendapatan Hibah Lainnya	5.1.1.c.2.	36,412,894,700.00	35,462,958,000.00
30	Jumlah Pendapatan Lain - lain yang Sah (28 s/d 29)		51,255,419,700.00	41,310,551,668.00
31	TOTAL PENDAPATAN (7 + 26 + 30)		1,334,565,745,518.00	1,312,684,406,143.32
32	BELANJA	5.1.2.		
33	BELANJA OPERASI	5.1.2.1.		
34	Belanja Pegawai	5.1.2.1.a.	456,991,339,303.00	425,154,354,873.00
35	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.b.	366,936,644,730.00	336,344,942,019.00
36	Belanja Hibah	5.1.2.1.c.	14,532,570,200.00	14,368,678,000.00
37	Bantuan Sosial	5.1.2.1.d.	2,002,478,000.00	2,002,469,000.00
38	Bantuan Keuangan			
39	JUMLAH BELANJA OPERASI (34 s/d 37)		840,463,032,253.00	777,870,443,892.00
40	BELANJA MODAL	5.1.2.2.		
41	Belanja Tanah	5.1.2.2.	2,993,000,000.00	1,098,877,641.00
42	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.	73,631,657,673.00	67,950,213,276.00
43	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.	139,078,726,999.00	137,419,773,229.00
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.	110,602,445,245.00	102,583,365,987.00
45	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.	2,488,116,600.00	2,154,795,800.00
46	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.	0.00	0.00
47	JUMLAH BELANJA MODAL (41 s/d 46)		328,793,946,517.00	311,207,025,933.00
48	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3.		
49	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.	13,586,428,507.00	12,543,680,861.00
50	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (49)		13,586,428,507.00	12,543,680,861.00
51	TRANSFER	5.1.2.4.		
52	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN			
53	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0.00	0.00
54	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN (53)		0.00	0.00
55	TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN			
56	Transfer Bagi Hasil	5.1.2.4.a.	5,729,400.00	0.00
57	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.2.4.b.	165,206,269,150.00	162,301,099,100.00
58	Transfer Bantuan Keuangan Khusus	5.1.2.4.c.	0.00	0.00
59	JUMLAH TRANSFER/BANTUAN KEUANGAN (56 s/d 58)		165,211,998,550.00	162,301,099,100.00
60	TOTAL BELANJA & TRANSFER (39 + 47 + 50 + 54 + 59)		1,348,055,405,827.00	1,263,922,249,786.00
61	SURPLUS/DEFISIT (31 - 60)	5.1.3.	(13,489,660,309.00)	48,762,156,357.32
62	PEMBIAYAAN	5.1.4.		
63	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.a.		
64	Penggunaan SILPA	5.1.4.a.	13,489,660,309.00	13,489,660,309.00
65	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen		0.00	0.00

66	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (64 s/d 65)		13,489,660,309.00	13,489,660,309.06
67	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.b.		
68	Pembentukan Dana Cadangan		0.00	0.00
69	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.b.	0.00	0.00
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0.00	0.00
71	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (68 s/d 70)		0.00	0.00
72	PEMBIAYAAN BERSIH (66 - 71)		13,489,660,309.00	13,489,660,309.06
73	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN/SILPA (61 - 72)	5.1.5.		62,251,816,666.38